

**PENGARUH KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH,
PERTUMBUHAN EKONOMI, *FISCAL STRESS*, DAN KEPADATAN
PENDUDUK TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL PADA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Enggar Bayu Kusumaningrum¹

Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan
enggarebk@yahoo.co.id

Hari Sugiyanto²

Politeknik Keuangan Negara STAN, Tangerang Selatan
hari.sugiyanto@pknstan.ac.id

Abstract

This study aims to examine the effect of financial performance, economic growth, fiscal stress, and population density on capital expenditure allocation. This research employs quantitative research methodology with multiple linear regression models. The sample used in this research is district or city in North Kalimantan. The type of data used in this study is secondary data from budget realization report and statistics Indonesia from 2013 to 2019. This study finds that independence ratio and fiscal stress are negatively associated with capital expenditure allocation. While efektivitas ratio, economic growth and population density are positively associated with capital expenditure allocation. Furthermore, financial performance, economic growth, fiscal stress, and population density simultaneously effect the allocation of capital expenditure.

Keywords: Financial Performance, Economic Growth, Fiscal Stress, Population Density, Capital Expenditure

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, *fiscal stress*, dan kepadatan penduduk terhadap alokasi belanja modal. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kuantitatif dengan model regresi linier berganda. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa LRA dan data dari Badan Pusat Statistik dari tahun 2013 hingga 2019. Hasil penelitian ini menemukan bahwa rasio kemandirian dan *fiscal stress* berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal, sedangkan rasio efektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan kepadatan penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Selanjutnya, kinerja keuangan pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, *fiscal stress*, dan kepadatan penduduk secara simultan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

Kata kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, *Fiscal Stress*, Kepadatan Penduduk, Alokasi Belanja Modal

A. Pendahuluan

Provinsi Kalimantan Utara merupakan pemerintah daerah tingkat I termuda di Indonesia. Dasar hukum yang mendasari pembentukan provinsi tersebut adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Wilayah Kalimantan Utara pada saat diresmikan terbagi ke dalam lima wilayah administrasi, yang terdiri dari satu kota dan empat kabupaten yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung.

Pemekaran wilayah dinilai dapat meningkatkan pembangunan daerah melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat (Yehekel et al., 2017). Hal tersebut juga diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri pada saat penetapan pemekaran Kalimantan Utara sebagai provinsi baru diharapkan dapat menjadi momentum titik awal perkembangan pembangunan di Kalimantan Utara (Tjahjono & Oktavianti, 2017).

Salah satu pengeluaran yang penting bagi pemerintah dalam pembangunan adalah belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran belanja daerah yang mencerminkan usaha dari pemerintah daerah untuk memajukan pembangunan daerahnya. Dalam

meningkatkan pembangunan daerah maka pemerintah daerah mengalokasikan jumlah yang besar pada belanja modal dalam APBD. Efek yang diberikan dari belanja modal merupakan hal yang baik untuk pertumbuhan ekonomi (Gerungan et al., 2015). Selain itu juga, belanja modal dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik dan dapat membentuk pemerintah daerah yang mandiri (Mardiasmo, 2002). Jika pemerintah daerah membangun sarana dan prasarana fasilitas publik, hal ini menambah kualitas pelayanan masyarakat dan menarik investor untuk ikut menanamkan modalnya. Hal tersebut dapat memberikan peluang pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan perkapita daerah. Apabila alokasi belanja modal Pemda semakin besar, maka Pemda dianggap serius dalam memberikan kesejahteraan bagi warganya (Gerungan et al., 2015).

Kinerja keuangan pemerintah daerah dinilai melalui anggaran yang dibuat oleh pemerintah daerah. Penilaian kinerja melalui anggaran diharapkan bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh pemda dialokasikan untuk perbaikan dan peningkatan layanan kepada warga sehingga pengalokasian belanja modal

akan lebih baik apabila memperoleh proporsi yang cukup tinggi (Indiyanti & Rahyuda, 2018). Penilaian kinerja keuangan digunakan untuk mengevaluasi tanggung jawab dan kapasitas fiskal suatu daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal (Marseno & Mulyani, 2020). Kinerja keuangan merupakan standar pengukuran kinerja dengan memakai keuangan sebagai indikatornya. Analisa kinerja keuangan bertujuan untuk mengevaluasi performa pemerintah daerah pada periode yang telah lewat melalui sejumlah analisa, dan digunakan untuk mendapatkan kondisi keuangan yang dapat menunjukkan situasi aktual dan kinerja potensial yang akan dilakukan pada tahun berikutnya.

Bertumbuhnya perekonomian masyarakat adalah sebagian tujuan penting pempus dan pemda. Selain merupakan tujuan penting dari pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk mengukur kemajuan dan keberhasilan pencapaian pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi digunakan oleh pemda guna mendorong pembangunan ekonomi daerah (Wibisono & Wildaniati, 2017). Upaya peningkatan perekonomian merupakan suatu sinergi pemerintah dengan rakyat dalam pengelolaan potensi yang tersedia dan menciptakan tata kelola sinergi antara pemerintah pihak swasta untuk membuat

lapangan kerja baru dan menstimulas peeningkatan perekonomian (Tahar, Afrizal dan Zakhiya, 2011). Selain itu juga, pertumbuhan ekonomi dapat digunakan untuk melihat gambaran kebijakan pembangunan daerah bertujuan untuk peningkatan perekonomian yang konsisten ialah Sebagian factor pemicu perekonomian daerah dalam rangka meningkatkan sejahteranya masyarakat. Agar peningkatan ekonomi bagus, kebijakan desentralisasi fiskal dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pelayanan publik.

Pertumbuhan ekonomi yang pesat akan menstimulasi pemerintah daerah untuk meningkatkan upaya pembangunan daerah. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum (Permana & Rahardjo, 2013).

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi alokasi belanja modal yaitu *fiscal stress*. *Fiscal stress* akan cepat terjadi apabila penerimaan daerah mengalami ketidakstabilan karena realisasi penerimaan lebih rendah dari anggaran penerimaan yang ditetapkan (Dick-Sagoe, 2020). Pemerintah daerah akan dituntut untuk memaksimalkan potensi dan kapasitas fiskal daerah untuk mengurangi

persentase ketergantungan kepada pusat (Purwanto, 2016).

Selain faktor keuangan, terdapat faktor non keuangan yang memengaruhi alokasi belanja modal. Faktor non keuangan tersebut ialah kepadatan penduduk. Semakin tinggi kepadatan penduduk maka tuntutan pada pelayanan layanan dasar umum akan semakin tinggi bagi setiap penduduk wilayah tersebut (Antara & Suryana, 2020).

Penelitian terkait kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan oleh Indiyanti & Rahyuda (2018) di Kabupaten/kota pada Provinsi Bali. Kinerja keuangan pemda dinilai menggunakan rasio tingkat desentralisasi fiskal, kemandirian keuangan, keefektifan PAD, penghematan belanja Pemda, tingkat *financing* SiLPA, dan tingkat partisipasi oleh perusahaan daerah. Simpulan dari studi ini ialah terdapat hubungan yang signifikan antara rasio kemandirian dan alokasi belanja modal.

Hidayat (2013) meneliti pengaruh kinerja keuangan daerah pada alokasi belanja modal. Studi tersebut mengambil objek kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2008 s.d. 2012. Hasil dari penelitian menyimpulkan adanya korelasi searah antara rasio keefektifan Pendapatan Asli Daerah dan pengalokasian belanja aset tetap (modal).

Huda (2015) melakukan penelitian pengaruh performa keuangan, *fiscal stress*, dan banyaknya jumlah penduduk terhadap pengalokasian belanja modal di Provinsi NTB pada tahun 2010 s.d. 2014. studi ini memberikan simpulan bahwa tingkat kemandirian tidak memengaruhi pengalokasian pembelanjaan aset tetap.

Marseno & Mulyani (2020) meneliti pengaruh *fiscal stress*, banyaknya jumlah warga, performa keuangan pemda terhadap pengalokasian belanja aset tetap. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan rasio ketergantungan. Hasil dari penelitian ini untuk variabel *fiscal stress* berpengaruh pada alokasi belanja modal. Untuk variabel kepadatan penduduk memiliki hubungan yang signifikan dengan alokasi belanja modal. Untuk variabel *fiscal stress* berpengaruh pada alokasi belanja modal.

Wibisono & Wildaniati (2017) meneliti bertumbuhnya perekonomian, PAD, DAU, SiLPA dan keluasan wilayah. Studi ini memberikan hasil bahwa pertumbuhan ekonomi di mana tidak memiliki hubungan dengan alokasi belanja modal. Berbeda dengan luas wilayah yang memiliki hubungan yang signifikan dengan alokasi belanja modal.

Novianto & Hanafiah (2015) meneliti efek bertumbuhnya perekonomian, PAD, jumlah warga dan

luasnya wilayah pada pengalokasian belanja modal. Studi ini memberikan hasil bahwa baik pertumbuhan ekonomi dan luas jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh pada alokasi belanja modal. Kemudian variabel luas wilayah memberikan hasil pengaruh signifikan pada alokasi belanja modal.

Gerungan et al., (2015) meneliti efek performa keuangan pada pengalokasian belanja aset tetap pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2007-2011. Studi ini memberikan hasil bahwa baik rasio kemandirian dan efektivitas PAD memberikan hubungan yang signifikan pada alokasi pengeluaran pembelian aset.

Dari pembahasan pada paragraph-paragraf sebelumnya, penulis melakukan penelitian di provinsi Kalimantan Utara, dikarenakan penelitian tentang pengaruh berbagai faktor terhadap alokasi Belanja Modal di Provinsi Kalimantan Utara belum pernah dilakukan. Selain itu, penulis tertarik untuk meneliti apakah penelitian terdahulu yang dilakukan di daerah/provinsi lain memberikan kesimpulan yang sama apabila penelitian dilakukan di Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mempelajari pengaruh: (a) rasio kemandirian terhadap alokasi belanja modal, (b) rasio keefektifan terhadap

alokasi belanja modal, (c) pertumbuhan ekonomi terhadap alokasi belanja modal, (d) *fiscal stress* terhadap alokasi belanja modal, (e) kepadatan Penduduk terhadap alokasi belanja modal, dan (f) pengaruh kinerja pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, *fiscal stress*, kepadatan penduduk secara simultan memiliki pengaruh pada alokasi belanja modal.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian berbentuk angka atau bilangan yang pengolahan atau analisisnya menggunakan teknik perhitungan matematis atau statistik (Sholikhah, 2017).

Instrumen penelitian menggunakan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber data. Jenis data yang akan diolah dalam studi ini data sekunder. Data sekunder adalah data yang mendukung kebutuhan data utama seperti buku, literatur dan bacaan yang berhubungan dengan riset (Gujarati & Porter, 2009). Data sekunder yang digunakan berupa Laporan Realisasi Anggaran tahun 2013 s.d. 2019 dan data kepadatan penduduk yang diperoleh dari situs resmi DJPK Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Data yang dikumpulkan kemudian disusun berupa data panel. Data panel adalah data yang berupa gabungan antara silang waktu dan data runtun waktu (Gujarati & Porter, 2009). Dari penelitian ini, data *cross section* ialah data dari 5 kabupaten/kota di Kalimantan Utara. Kemudian, untuk *data time series* yaitu tahun 2013 sampai dengan tahun 2019.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Statistika Deskriptif

Tabel 1. Hasil Pengujian

VAR	AVERAGE	MAX	MIN	MEDIAN	STD
ABM	0,341690	0,587789	0,123780	0,343880	0,133848
KEMAN	0,084991	0,171958	0,030705	0,081600	0,037953
KEEFEK	1,248195	3,050524	0,517856	1,079387	0,624384
PE	0,054936	0,115527	0,008760	0,055694	0,024173
FS	0,001473	0,003511	6,63E-05	0,001285	0,000794
KP	211,1371	1080,000	1,970000	9,750000	412,6561

Sumber : Diolah penulis, 2021

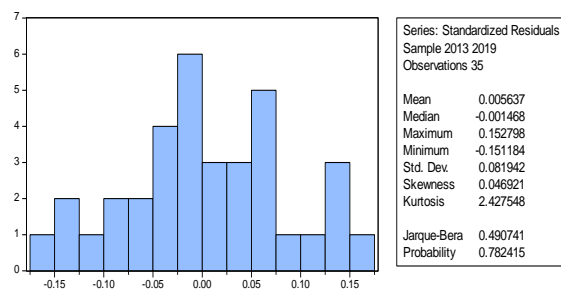
Tabel 1 dapat menggambarkan pendistribusian data seperti berikut ini: Kinerja Keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan rasio kemandirian dan keefektifan memberikan gambaran data bahwa nilai terendah rasio kemandirian dan efektivitas 3% dan 52% sedangkan nilai tertingginya adalah 17% dan 300% dengan rata-rata 8% dan 125% dengan median 8% dan 108% sedangkan nilai standar deviasi adalah 3% dan 62%. Pertumbuhan ekonomi memiliki nilai terendah 1% sedangkan nilai tertingginya 11,6% dengan rata-rata 5,5% dan median 5,6% dengan standar deviasi 2,4%. *Fiscal*

stress memiliki nilai terendah 0,00006 dan tertinggi 0,0035 dengan nilai rata-rata 0,0015 dan median 0,0013 sedangkan standar deviasi 0,0008. Kepadatan penduduk memiliki nilai terendah 1,97 dan tertinggi 1080 dengan rata-rata 211,14 dan median 9,75 sedangkan standar deviasi 412,66. Alokasi belanja modal bernilai terkecil 12% dan nilai terbesar 59% dan rataaan 34% dan median 34% sedangkan standar deviasi 13%.

2. Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Pengujian



Sumber : Data diolah, 2021

Hasil pengujian normalitas terlihat pada Tabel 2. Pada gambar dihasilkan bahwa uji normalitas residual menghasilkan Jarque-Bera sebesar 0,490741 dan nilai probabilitas senilai 0,782415. Dengan nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 menandakan data berdistribusi normal dan tidak terdapat masalah normalitas.

2. Hasil Uji. Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Pengujian

Var	Coef. Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
KEMAN	0.181759	21.18083	1.758775
KEEFEK	0.000733	10.75877	2.314794
PE	0.271851	10.14387	1.467185
FS	550.4311	21.62726	2.405881
KP	8.62E-10	5.672726	2.348763
C	0.003008	32.65919	NA

Sumber : Data diolah, 2021

Dari Tabel 3 di atas dapat dikatakan bahwa tidak ada dari variabel independen memiliki $VIF \geq 10$. Hal tersebut dapat dikatakan model yang terpilih untuk digunakan dalam penelitian tidak terjerang multikolinearitas.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4. Hasil Pengujian

Variaebel	Prob.
KEMAN	0,6079
KEEFEK	0,0193
PE	0,883
FS	0,8194
KP	0,0157
c	0,0010

Sumber : Data diolah, 2021

Pada Tabel 4., nilai Prob. dari C atau konstanta bernilai 0,0010 atau di bawah nilai signifikansi. Hal tersebut mengindikasikan adanya masalah heteroskedastisitas. Masalah ini dapat diatasi dengan GLS pada *cross Section weights*, sehingga masalah heteroskedastisitas diasumsikan sudah

memenuhi *Best Linear Unbiased Estimator* (BLUE).

4. Uji Autokorelasi

Tabel 5. Hasil Pengujian

Mean dependent var	0,479627
S.D. Dependent var	0,335720
Sum squared resid	0,229404
Durbin-Watson stat	1,783867

Sumber : Data diolah, 2021

Dari hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 5 dan memberikan hasil bahwa nilai DW stat = 1,783867 yang berada di antara DL dan DU, ($1,1601 < d < 1,8029$) menandakan bahwa pengujian tidak dapat mendeteksi adanya autokorelasi positif. Nilai $(4-DW) = 4 - 1,78386 = 2,21714$, dan nilai tersebut lebih besar dari DU, $(4-d) > DU = (2,21714 > 1,8029)$ menandakan bahwa pengujian tidak dapat mendeteksi adanya autokorelasi negatif. Selain dari nilai *Durbin Watson* yang menunjukkan bahwa tidak ditemukannya adanya tanda terjadinya autokorelasi, untuk data berupa data panel, pengujian asumsi klasik tidak diperlukan, karena data panel akan meminimalisasi perbedaan dalam hasil analisa dan menginformasikan variasi, dan derajat kebebasan (Gujarati & Porter, 2009).

4. Hasil Regresi Linear Berganda

Tabel 6. Hasil Pengujian

Variabel	Coefficient	Prob.
C	0,273153	0,0000
KEMAN	-1,137913	0,0123
KEEFEK	0,111142	0,0003
PE	1,083166	0,0467
FS	-61,95765	0,0132
KP	0,000224	0,0000

Sumber : Data diolah, 2021

5. Uji Kelayakan Model

1. Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 7. Nilai Koefisien Determinasi

Keterangan	Nilai
R-squared	0,772082
Adjusted R-squared	0,732786

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 7, nilai R² adalah 0,772082. Maka dapat dikatakan variabel independen penelitian ini memiliki kapabilitas dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 77,21% dan sisanya sebesar 22,79% tidak dijelaskan variable dependen.

2. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Tabel 8. Hasil Uji-F

Keterangan	Nilai
F-statistics	19,6478
Prob (F-statistic)	0,0000

Sumber : Data diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 8, probabilitas kurang dari signifikansi 0,05 , sehingga variabel independen dalam penelitian ini memengaruhi variabel dependen (alokasi belanja modal) secara simultan.

3. Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Tabel 9. Hasil Uji-t

Variabel	Coefficient	Prob. One-Tailed
C	0,273153	0,0000
KEMAN	-1,137913	0,00615
KEEFEK	0,111142	0,000015
PE	1,083166	0,02335
FS	-61,95765	0,0066
KP	0,000224	0,0000

Sumber : Data diolah, 2021

Dari di atas dapat penjelasannya adalah: **Pengaruh. Rasio Kemandirian terhadap Alokasi Belanja Modal**

Rasio kemandirian (KEMAN) berkoefisien -1.137913 dan nilai Prob. one-tailed 0,00615 yang lebih kecil dari nilai α yang berarti bahwa rasio kemandirian

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variable dependen.

Pengaruh Rasio Efektivitas terhadap Alokasi Belanja Modal

Rasio efektivitas (KEEFEK) berkoefisien 0.111142 dan nilai *Prob. one-tailed* 0,000015 yang lebih kecil nilai α yang berarti bahwa rasio efektivitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable dependen.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Alokasi Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi (PE) berkoefisien 1.083166 dan nilai *Prob. one-tailed* 0,02335 yang lebih kecil nilai α yang berarti bahwa variable ini (independen) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen.

Pengaruh Fiscal Stress terhadap Alokasi Belanja Modal

Fiscal stres (FS) memiliki nilai koefisien - 61,95765 dan nilai *Prob. one-tailed* 0,0066 yang kurang dari nilai α yang berarti bahwa *fiscal stress* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap variable dependen.

Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Alokasi Belanja Modal

Kepadatan penduduk (KP) berkoefisien 0.000224 dan nilai *Prob. one-tailed* 0.0000 yang kurang dari nilai α yang berarti bahwa kepadatan penduduk berpengaruh

positif dan signifikan terhadap variabel dependen.

Pembahasan

1. Pengaruh Rasio Kemandirian terhadap Alokasi Belanja Modal

Hipotesis mengenai rasio kemandirian menyatakan bahwa rasio kemandirian berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Hal ini dapat dijelaskan karena pemerintah daerah kabupaten/kota di Kalimantan Utara mendapatkan uang dari pemerintah pusat berupa DAU dengan jumlah yang cukup besar namun penggunaan dana tersebut tidak dialokasikan untuk belanja modal daerah. DAU banyak digunakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan lain yaitu untuk membayar belanja pegawai dan belanja operasional pemerintah daerah (Mochamad Fajar Hidayat & Maski, 2012). Selain itu, dilihat dari dana transfer DAK, pemerintah daerah kabupaten/kota di Kalimantan Utara menerima jumlah dana alokasi khusus yang cenderung lebih kecil jumlahnya dari DAU dan DBH. Dilihat dari tujuannya, diberikannya DAK kepada pemda digunakan untuk memenuhi kegiatan atau infrastruktur, di mana infrastruktur ini termasuk ke dalam belanja modal dan pendanaannya 25% dari APBD. Sehingga, dapat dikatakan bahwa semakin besar pemda menerima DAK maka akan kenungkinan besar semakin banyak

pengalokasian DAK ke pembelanjaan aset tetap (Hidayat & Maski, 2012). Hal ini mirip dengan pendapat Gerungan et al., (2015) yang menjelaskan adanya pengaruh negative signifikan antara rasio kepandiiran dengan pembelanjaan untuk pembelian aset tetap (modal).

2. Pengaruh Rasio Efektivitas terhadap Alokasi Belanja Modal

Hipotesis mengenai rasio efektivitas menyatakan bahwa belanja modal dipengaruhi secara positif oleh rasio efektivitas. Bila melihat elemen yang memengaruhi pemda untuk mengalokasikan belanja modal, maka dapat diharapkan rasio efektivitas dapat menjadi salah satu pertimbangan pemda untuk lebih besar mengalokasikan belanja modal daerah untuk meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu juga, semakin tinggi nilai rasio efektivitasnya maka pemerintah daerah tersebut memiliki kemampuan yang baik dalam merealisasikan PAD yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pembangunan daerahnya.

3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Alokasi Belanja Modal

Hipotesis mengenai pertumbuhan ekonomi memberikan pernyataan adanya pengaruh pertumbuhan ekonomi yang positif

terhadap alokasi pembelanjaan modal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Hal tersebut dikarenakan belanja modal merupakan hal yang dilakukan oleh pemda untuk melakukan pengadaan sarana prasarana, fasilitas dan infrastruktur yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (Jaya & Dwirandra, 2014). Selain itu juga, salah satu parameter untuk menilai keberhasilan pembangunan ialah pertumbuhan ekonomi (Wibisono & Wildaniati, 2017). Pertumbuhan ekonomi mempunyai peranan yang penting dalam penerimaan daerah. Jika daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik, maka penerimaan daerah diharapkan akan meningkat juga sehingga pemda akan meningkatkan pengalokasian pembelanjaan aset tetap (modal). Dalam desentralisasi fiskal, pemerintah pusat mengizinkan agar pemda memiliki kemampuan mengelola sumber dayanya sehingga tidak terlalu mengandalkan pertumbuhan ekonomi (Mayasari et al., 2014). Hasil penelitian ini sejalan dengan (Purwanto, 2016).

4. Pengaruh *Fiscal Stress* terhadap Alokasi Belanja Modal

Hipotesis mengenai *fiscal stress* menyatakan bahwa *fiscal stress* berpengaruh positif terhadap alokasi

belanja modal. Dari riset ini ditunjukkan bahwa *fiscal stress* berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal. Hal tersebut dikarenakan terjadinya pembengkakan pengeluaran pemerintah daerah disebabkan oleh proporsi pengeluaran belanja daerah paling banyak adalah belanja gaji dan belanja barang (perjalanan, pemeliharaan, honor-honor, dan lain-lain) sehingga ketika pemerintah daerah mengalami *fiscal stress* tersebut pemerintah daerah akan berusaha lebih mengoptimalkan potensi-potensi daerah untuk mendongkrak peningkatan pendapatan daerahnya guna menutupi pengeluaran belanja pegawai. Pengeluaran belanja modal dapat dipenuhi dengan menggunakan dana transfer berupa DAK yang didapat pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Dan sebagaimana diketahui bahwa DAK yang didapat oleh pemerintah daerah bernilai kecil daripada DAU. Sehingga pengalokasian belanja modal hanya bergantung pada besarnya DAK yang didapat pemerintah daerah.

5. Pengaruh Kepadatan Penduduk terhadap Alokasi Belanja Modal

Hipotesis mengenai kepadatan penduduk menyatakan bahwa kepadatan penduduk berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepadatan penduduk berpengaruh positif terhadap alokasi

belanja modal. Hal tersebut terjadi karena daerah yang memiliki nilai kepadatan penduduk tinggi terletak pada pusat kota provinsi tersebut. Hal tersebut dapat dilihat bahwa Kota Tarakan memiliki nilai kepadatan penduduk dan belanja modal yang besar. Daerah yang memiliki letak lebih dekat dengan pusat kota atau ibukota provinsi memiliki nilai kepadatan penduduk yang lebih besar. Hal ini dikarenakan pembangunan fisik seperti bangunan, gedung, jalan, dan lain-lain cenderung banyak membangun di daerah yang dekat dengan pusat kota dibandingkan dengan daerah yang jauh dari pusat kota. Selain itu juga, dapat disebabkan karena lambatnya persebaran penduduk yang hanya di kota besar yang memiliki nilai kepadatan penduduk yang besar sehingga pembangunan daerah hanya berpusat di kota besar daerah tersebut. Jika pemda memiliki fasilitas yang memadai maka masyarakat daerah akan merasa aman dan menikmati aktivitasnya sehari-hari secara aman, bebas, dan damai. Sehingga akan mempengaruhi tingkat produktivitas yang akan semakin meningkat dengan adanya sarana prasarana dan infrastruktur yang memadai (Sari & Ningsih, 2018).

6. Pengaruh Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Ekonomi, *Fiscal Stress*, dan Kepadatan Penduduk Secara Simultan Berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal

Hasil uji simultan diperoleh nilai probabilitas 0,0000 kurang dari signifikansi 0,05. Dengan demikian, secara simultan kami menyimpulkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini memiliki pengaruh pada variabel dependen. Dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan pemda, pertumbuhan ekonomi, *fiscal stress* dan kepadatan penduduk secara simultan dapat berpengaruh pada alokasi belanja modal di Kalimantan Utara. Dengan demikian, pemda dalam mengalokasikan belanja modal tidak hanya memperhatikan hal keuangan saja namun juga hal non-keuangan seperti kepadatan penduduk, jumlah penduduk, luas wilayah untuk dapat membangun dan meningkatkan sarana prasarana pelayanan publik untuk masyarakat.

D. Simpulan

Berdasarkan pada penelitian yang sudah dilakukan atas pengaruh kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi, *fiscal stress*, dan kepadatan penduduk pada alokasi belanja modal, maka terdapat beberapa simpulan berikut ini:

1. Rasio kemandirian berpengaruh negatif dan signifikan pada alokasi belanja

modal. Hal ini dipicu oleh penggunaan DAU oleh pemerintah daerah dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan belanja pegawai atau operasional. Selain itu, pemda menerima jumlah nilai DAK lebih kecil dibandingkan dengan DAU.

2. Rasio efektivitas berpengaruh positif signifikan pada alokasi belanja modal. Hal ini dikarenakan rata-rata rasio efektivitas bernilai lebih dari 100% sehingga termasuk ke dalam pemerintah daerah yang efektif dalam merealisasikan target pendapatan asli daerah sehingga pemerintah daerah dianggap memiliki kemampuan untuk menggunakan pendapatan asli daerah guna memenuhi kebutuhan belanja pembangunan daerahnya.
3. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan pada alokasi belanja modal. Hal ini karena peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah sehingga untuk mengimbangi hal tersebut pemerintah lebih banyak mengalokasikan belanja modal dengan cara meningkatkan pelayanan publik.
4. *Fiscal stress* berpengaruh negatif signifikan pada alokasi belanja modal. Hal ini dikarenakan mungkin terjadi karena pemerintah daerah berusaha

untuk mengurangi tekanan fiskal dengan cara menggali potensi sumber-sumber PAD namun tidak dialokasikan ke belanja modal.

5. Kepadatan penduduk berpengaruh positif signifikan pada alokasi belanja modal. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan persebaran penduduk yang meningkatkan mengharuskan pemerintah untuk meningkatkan belanja modal agar tidak terjadi ketimpangan pembangunan.
6. Kinerja keuangan, pertumbuhan penduduk, *fiscal stress*, dan kepadatan penduduk secara simultan berpengaruh pada alokasi belanja modal. Hal tersebut mungkin dapat terjadi karena komponen-komponen yang mempengaruhi pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja modal tidak hanya komponen keuangan saja melainkan komponen non-keuangan.

E. Daftar Pustaka

- Antara, I. G. M. Y., & Suryana, I. G. P. E. (2020). Pengaruh Tingkat Kepadatan Penduduk Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. *Media Komunikasi Geografi*, 21(1), 63. <https://doi.org/10.23887/mkg.v21i1.22958>
- Dick-Sagoe, C. (2020). Decentralization for improving the provision of public services in developing countries: A critical review. *Cogent Economics and Finance*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1804036>
- Gerungan, S. F., Saerang, D. P. E., & Pontoh, W. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Provinsi Sulawesi Utara. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING" GOODWILL"*, 6(1).
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). Basic econometrics (international edition). *New York: McGraw-Hills Inc.*
- Hidayat, Mochamad Fajar, & Maski, G. (2012). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(2).
- Hidayat, Mohammad Fajar. (2013). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, 1(2), 1–19. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/580>
- Huda, A. S. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan, Fiscal Stress, dan Kepadatan Penduduk terhadap Alokasi Belanja Modal di Nusa Tenggara Barat. *Assets*, 5(2), 152–166. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/assets/article/view/1194>.
- Indiyanti, N. M. D., & Rahyuda, H. (2018). Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Alokasi Belanja Modal di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(9), 4713. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v07.i09.p04>
- Jaya, I., & Dwirandra, A. (2014). Pengaruh pendapatan asli daerah pada belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(1), 79–92.

- Mardiasmo. (2002). Elaborasi Reformasi Akuntansi Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Upaya Aktualisasi Kebutuhan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 6(1), 63–82.
- Marseno, B., & Mulyani, E. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Jumlah Penduduk Dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2016-2019). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3452–3467.
- Mayasari, L. P. R., Sinarwati, N. K., & Yuniarta, G. A. (2014). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI Ak Universitas Ganesha*, 2(1), 11.
- Novianto, R., & Hanafiah, R. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi*, 4(1), 1–22.
- Permana, D. Y., & Rahardjo, S. N. (2013). Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(4), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Purwanto, D. (2016). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum, Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Realisasi Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 11(2).
- Sari, P., & Ningsih, N. H. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal melalui PAD, DAU, dan DAK sebagai Variabel Intervening. *Akuntabilitas*, 12(2), 99–112.
- Sholikhah, A. (1970). Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 10(2), 342–362. <https://doi.org/10.24090/komunika.v10i2.953>
- Tahar, Afrizal dan Zakhiya, M. (2011). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 12(1), 88–99.
- Tjahjono, A., & Oktavianti, R. (2017). Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Di Provinsi DIY. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*, 24(1), 25–34. <https://doi.org/10.32477/jkb.v24i1.215>
- Wibisono, N., & Wildaniati, A. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, SiLPA dan Luas Wilayah Terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. *JURNAL EKOMAKS*, 5(2).
- Yeheskel, Adam Idris, & Burhanudin. (2017). Dampak Terbentuknya Provinsi Kalimantan Di Kabupaten Bulungan. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 1483–1496.